

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan fleksibilitas kerja (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, khususnya dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang hari kerja dan jam kerja fleksibel. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan fleksibilitas kerja ini diterapkan dalam sektor pemerintahan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi proyeksi kebijakan FWA dalam jangka menengah dan panjang, serta indikator keberhasilannya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dan analisis dokumen yang relevan. Data yang digunakan diperoleh melalui kajian terhadap artikel, jurnal, serta laporan penelitian yang membahas implementasi kebijakan FWA di instansi pemerintah, seperti PTUN Yogyakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FWA telah membawa dampak positif terhadap kinerja ASN, efisiensi anggaran, dan aksesibilitas layanan publik, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan pegawai. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi beban administratif, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pelayanan publik. Proyeksi jangka panjang kebijakan ini menunjukkan bahwa FWA akan menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi, yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga mengarah pada pengurangan biaya operasional dan optimalisasi kinerja ASN. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan agar kebijakan fleksibilitas kerja dapat diterapkan secara lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi ASN juga diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Kata Kunci : Fleksibilitas Kerja, Reformasi Birokrasi, Efisiensi Anggaran, Kinerja ASN, Perpres No. 21 Tahun 2023, Aksesibilitas Layanan Publik, Teori Edwards.